



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 email: bkd@kalteng.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 861 /II.7/BKD
Tanggal : 08 Desember 2020

TENTANG HASIL SELEKSI DAN PERSIAPAN PEMBERKASAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TAHAP I TAHUN 2019

Berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 547 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Tahap I yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019, disampaikan bahwa yang dinyatakan Lulus Seleksi PPPK sebanyak 8 (delapan) orang; (Pengumuman Terlampir)
2. Menyampaikan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 547 Tahun 2020 tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 berjumlah 9 (sembilan) Formasi dengan kualifikasi Pendidikan; (SK Terlampir)
3. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kapuas Nomor : 800/297/P31/BKPSDM/2020 tanggal 08 Oktober 2020 menerangkan bahwa terdapat 1 (satu) peserta a.n ETTI SUPRIATI mengalami kesalahan pendaftaran sehingga pada proses pemberkasan yang bersangkutan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Berdasarkan poin 1 s.d 3 diatas dengan ini disampaikan kepada 9 (sembilan) peserta PPPK yang Lulus Seleksi untuk melaksanakan pemberkasan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai; (contoh format DRH terlampir)
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh ybs dan bermaterai 6000, yang berisi tentang :
 - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);

- 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - 5) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. Seluruh berkas asli di *scan* dan dikirimkan ke alamat email: forselkadbkdprovkalteng2016@gmail.com paling lambat hari **Selasa 15 Desember 2020**;

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BADAN,**
MUHAMAD KATMA F. DIRUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 199308 1 001

Lampiran Contoh Format Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp 6000

.....

Foto
4x6**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****I. KETERANGAN PERORANGAN**

1	Nomor Induk Kependudukan (NIK)		
2	Nama		
			*)
3	Kabupaten/Kota Tempat Lahir		
			*)
4	Tanggal Lahir		
			*)
5	Jenis Kelamin		
6	Agama/Aliran Kepercayaan		
7	Status Perkawinan		
8	E-Mail		
9	Nomor Telepon/Handphone		
10	Alamat	a. Jalan	
		b. Kelurahan/Desa	
		c. Kecamatan	
		d. Kabupaten/Kota	
		e. Provinsi	
11	Keterangan Badan	a. Tinggi (cm)	
		b. Berat Badan (kg)	
		c. Rambut	
		d. Bentuk Muka	
		e. Warna Kulit	
		f. Ciri Khas	
		g. Cacat Tubuh	
12	Kegemaran (Hobby)		

*) Ditulis dengan huruf Kapital/Balok dan tinta hitam

I. PENDIDIKAN**1. Pendidikan di dalam dan luar negeri**

No	Tingkat	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Akreditasi	Tempat	STTB/ IJAZAH			Gelar	
					Nomor	Tanggal	Pejabat Penandatanganan	Depan	Belakang

2. Kursus/ Latihan di dalam luar negeri

No	Nama Kursus/ Latihan	Lamanya		Nomor	Tempat	Institusi Penyelenggara
		Tanggal Mulai	Tanggal Selesai			

III. TANDA JASA/PENGHARGAAN

No	Nama Bintang/ Lencana Penghargaan	Surat Keputusan		Tahun Perolehan	Nama Negara/ Instansi yang memberikan
		Nomor	Tanggal		

IV. RIWAYAT KELUARGA**1. Isteri/ Suami**

No	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Perkawinan	Akte Nikah/ Akte Cerai	Tanggal Menikah/ Cerai/ Meninggal	Status Hidup

2. Anak

No	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

3. Orangtua Kandung

No	NIK	NIP**	NAMA	Tempat, Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Posisi Jabatan	Perusahaan/ Institusi	Status Hidup

VI. KETERANGAN LAIN-LAIN

NO	NAMA KETERANGAN	SURAT KETERANGAN		
		NOMOR	TANGGAL	PEJABAT
1	SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN			
2	SURAT KETERANGAN SEHAT			
3	SURAT KETERANGAN BEBAS NAPZA			
4	KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU			

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

.....,,
 Yang membuat

(.....)

PERHATIAN :

1. Pada bagian *) Harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan hurup Kapital/balok dan tinta hitam.
2. Pada bagian **) diisi hanya jika CPNS/PNS/Pensiunan PNS



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK 2019

Kode		Jumlah
Instansi	: 6700 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	8
Kelompok Jabatan	: 1 - Tenaga Guru	8

Halaman 1 dari 2 halaman

No	No Peserta	No Identitas TH	Nama	Nilai Ujian						Ket
				Kompetensi				Wawan cara	Total	
				Teknis	Manajerial	Sosio Kultural	Subtotal			
1	6700K230000007	670713001378	ROHANA	57	15	14	86	23	109	P/L
2	6700K230000003	670612000392	ENDANG	51	21	14	86	23	109	P/L
3	6700K230000009	671213002712	LELITAWATIE	51	19	14	84	25	109	P/L
4	6700K130000005	670742001796	INDRA NAFTALI	57	17	12	86	22	108	P/L
5	6700K230000012	671213002774	SELPIA HANDAYANI	48	19	10	77	26	103	P/L
6	6700K230000005	670413002329	DAHLIANI	48	13	12	73	26	99	P/L
7	6700K130000002	670413002383	TRAIMA.HS	60	9	8	77	20	97	P/L
8	6700K230000010	677112000365	INDAH TRIANINGSIH	48	15	6	69	24	93	P/L
9	6700K130000001	670413002756	ALGAMIX	39	16	8	63	25	88	TP
10	6700K230000004	670613000783	SUSIANI	36	19	12	67	20	87	TP
11	6700K230000001	670613000827	ZAITUN	36	19	8	63	23	86	TP
12	6700K230000006	670613000872	MERISANA	42	12	4	58	26	84	TP
13	6700K130000004	670413002249	MIRWAN EDDY	39	11	6	56	25	81	TP
14	6700K130000003	671212001192	SUMANSYAH	39	9	6	54	24	78	TP
15	6700K230000011	670412001085	YUSNANI	36	9	6	51	23	74	TP
16	6700K230000002	670412001298	SUCI NARWATY	21	13	2	36	25	61	TP



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

Jumlah Formasi	Jumlah Peserta	Kehadiran		Memenuhi Ambang Batas		Kelulusan		Nilai Ujian	
		Hadir	Tidak Hadir (2-3)	Jumlah	% (6/3)	Jumlah	% (7/3)	Tertinggi	Terendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	16	16	0	8	50%	8	50%	109	61



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK 2019

Kode		Jumlah
Instansi	: 6700 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	8
Kelompok Jabatan	: 4 - Tenaga Kesehatan	0
Halaman	1 dari 1 halaman	

No	No Peserta	No Identitas TH	Nama	Nilai Ujian				Ket	
				Kompetensi			Wawancara		Total
				Teknis	Manajerial	Sosio Kultural			

Jumlah Formasi	Jumlah Peserta	Kehadiran		Memenuhi Ambang Batas		Kelulusan		Nilai Ujian	
		Hadir	Tidak Hadir (2-3)	Jumlah	% (6/3)	Jumlah	% (7/3)	Tertinggi	Terendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0		0		0	0



PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN PPPK 2019

HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK 2019

Kode		Jumlah
Instansi	: 6700 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	8
Kelompok Jabatan	: 5 - Penyuluh Pertanian	0

Halaman 1 dari 1 halaman

No	No Peserta	No Identitas TH	Nama	Nilai Ujian				Ket	
				Kompetensi			Wawan cara		Total
				Teknis	Manajerial	Sosio Kultural			

Jumlah Formasi	Jumlah Peserta	Kehadiran		Memenuhi Ambang Batas		Kelulusan		Nilai Ujian	
		Hadir	Tidak Hadir (2-3)	Jumlah	% (6/3)	Jumlah	% (7/3)	Tertinggi	Terendah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0	0	0		0		0	0

Keterangan:

- P: Lulus nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019
- TP: Tidak memenuhi nilai ambang batas minimal sesuai ketentuan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2019
- L: Lulus seleksi PPPK karena masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi
- TL: Tidak lulus seleksi PPPK karena tidak masuk peringkat terbaik sesuai jumlah formasi
- TMS: Tidak Memenuhi Syarat

Jakarta, 4 April 2019

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Kepegawaian Negara
selaku
Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional PPPK 2019

Bima Haria Wibisana

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen dapat dicek keasliannya menggunakan fitur Pengecekan Dokumen SSCASN





MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 547 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, memenuhi kebutuhan pegawai yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dipandang perlu mengisi kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. bahwa untuk pengisian kebutuhan Aparatur Sipil Negara dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1017/MK.02/2018 tanggal 21 Desember 2018;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K26-30/V62-4/93 tanggal 8 Mei 2019;
 3. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 800/183/II.6/BKD tanggal 15 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah **9** (sembilan) sebagaimana terlampir;

- KEDUA** : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- KETIGA** : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 21 Oktober 2020

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Perimbangan Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 547 Tahun 2020
Tanggal : 21 October 2020

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
JUMLAH SELURUHNYA			9		
A	GURU		9		
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	1	SMAN 1 KURUN
2	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING	1	1	SMAN 6 PALANGKARAYA
3	AHLI PERTAMA - GURU EKONOMI	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	1	SMAN 1 SERUYAN HULU
		S-1 EKONOMI	1	1	SMAN 2 BANAMA TINGANG
4	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S1 ADMINISTRASI NEGARA	1	1	SMAN 2 KUALA KAPUAS
5	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1	1	SMKN 1 CEMPAGA
6	AHLI PERTAMA - GURU AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	S1 PENDIDIKAN BIOLOGI	1	1	SMKN 1 PULAU HANAUT
7	AHLI PERTAMA - GURU PRODUK KREATIF DAN KEWIRUSAHAAN	S1 EKONOMI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN BIDANG STUDI KOPERASI	1	1	SMKN 1 SERUYAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2	3	4		5
8	AHLI PERTAMA - GURU SEJARAH	S-1 IPS SEJARAH	1	1	SMAN 1 SEPANG



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Tjahjo Kumolo